

TAMBAHAN KUOTA SAMPAH HANYA SEMENTARA

Pemkab/Pemkot di DIY Jangan 'Njagakke'

YOGYA (KR) - Persoalan sampah sampai saat ini masih menjadi permasalahan serius bagi Pemda DIY dan Pemkab/Pemkot di DIY.

Terbatasnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan menjadi tantangan tersendiri bagi kabupaten/kota dalam mengelola sampah. Kondisi itu menjadikan program desentralisasi harus benar-benar direalisasikan. Karena solusi penambahan kuota di TPA Regional Piyungan hanya bersifat sementara dan tidak akan menyelesaikan masalah sampah secara fundamental.

"Meski dalam situasi darurat sampah TPA Regional Piyungan sempat dibuka, tapi kami minta Pemkab maupun Pemkot tidak bergantung kepada TPA Piyungan. Karena kalau setiap ada masalah dibuang ke TPA Piyungan masih bisa, kan *ra bakal rampung*. Karena tidak bisa *njagakke* (selalu tergantung) dengan TPA Piyungan, tidak bisa begitu terus," tandas Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (6/8).

Pemkab Sleman secara informal mengajukan penambahan kuota pembuangan sampah 500-1.000 ton. Sementara Pemkot Yogya dan Pemkab Bantul masing-masing dengan kuota 200 ton. Menurut Beny, kondisi di TPA Piyungan saat ini mampu menampung 1.000 ton sampah. Kuota ini dapat dimanfaatkan untuk pergeseran sampah dari beberapa daerah. Dengan catatan untuk mengurangi penumpukan sampah, termasuk di sejumlah ruas jalan. Kendati demikian bukan berarti apabila ada tumpukan sampah di depo atau sejumlah ruas jalan langsung bisa ditampung ke TPA Regional Piyungan, mengingat ada keterbatasan.

"Memang di sana diperkirakan masih bisa menampung sekitar 1.000 ton. Tapi kalau itu dilepas terus, *kan ora rampung-rampung mengko*. Artinya kita harus dialog, langkah konkret apa yang perlu dilakukan, karena tidak mungkin selamanya mengandalkan TPA Piyungan," jelasnya.

Dimintai tanggapan soal kuota penambahan sampah untuk Sleman, Sekda DIY belum bisa memastikan. Mengingat Pemkab Sleman belum bersurat secara resmi. Jadi permintaan penambahan kuota pembuangan sampah baru disampaikan secara informal. Kendati demikian pihaknya tidak langsung menyetujui penambahan kuota 1.000 ton. Pasalnya jika langsung diololoskan semua bisa berdampak kepada TPA Piyungan maupun daerah lain yang juga mengajukan kuota.

"Kalau untuk pengajuan penambahan kuota secara formal belum mengajukan, karena sampai hari ini saya belum dapat surat resminya. Sementara kuota maksimal di sana tinggal 1.000 ton. Untuk itu kami terus mendorong agar Pemkab maupun Pemkot merumuskan manajemen risiko secara matang. Termasuk atas kemunculan residu dari pengolahan sampah. Apabila tak dipersiapkan, kondisi ini dapat menjadi masalah baru," paparnya.

(Ria)-f

WARTAWAN 'KR' JADI NARSUM RRI JAYAPURA

Kupas Citizen Journalism, Tangkal Hoaks



KR-Istimewa

Wartawan dari 'KR' dan Republika menjadi narasumber di RRI Jayapura.

JAYAPURA (KR) - Wartawan SKH *Kedaulatan Rakyat* Yogyakarta, M Sobirin menjadi salah satu narasumber Dialog Sore di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Jayapura, Selasa (6/8) pukul 16.00-17.00.

Kehadiran M Sobirin yang juga Wakil Ketua PWI Bidang Organisasi DIY di Papua ini dalam rangka Kunjungan Jurnalistik 2024 yang digagas Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kominfo RI.

diandalkan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain RRI, masyarakat Papua juga mengikuti beragam informasi dan berita melalui TVRI Jayapura.

Para wartawan yang mengikuti Kunjungan Jurnalistik juga didaulat untuk menjadi narasumber pada 'Papua 60 Menit' di TVRI setempat, yakni Agus Setiawan (LKBN Antara) dan Ficky Ramadhan Budiono dari Media Indonesia.

Sedangkan beberapa wartawan lainnya menjadi narasumber dalam forum diskusi publik 'Citizen Journalism untuk Generasi Muda' yang diikuti mahasiswa dan perwakilan komunitas di Jayapura.

Kunjungan Jurnalistik selama beberapa hari tersebut dan diprakarsai Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan Keamanan Kominfo ini, juga sebagai kunjungan balasan kepada para jurnalis di Papua yang pada 2022 dan 2023 pernah berkunjung ke Yogya dan Bandung. Salah satu yang dikunjungi waktu itu

Kedaulatan Rakyat.

Tema dialog yang dipandu penyiar RRI Jayapura, Ida Susilowati ini banyak mengupas citizen journalism, terutama kaitannya dengan generasi muda. Menurut M Sobirin, citizen journalism atau jurnalistik warga kini berkembang pesat. Lebih-lebih ketika kemudiansalnya penyalurannya bermunculan di media sosial (medsos).

Diakuinya, citizen journalism merupakan ekspresi warga yang mungkin selama ini merasa kurang puas dengan berita-berita yang ada, termasuk di media mainstream. Namun, menurutnya, tetap memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar. "Tidak melanggar etika, memunculkan ketidakbenaran dan menjadi isu yang memperkeruh dan meresahkan masyarakat," katanya.

Menanggapi pertanyaan pendengar bernama David melalui sambungan telepon, soal bagaimana menyikapi berita hoaks yang sering muncul di Papua, baik Sobirin maupun Hasan meminta agar masyarakat memperhatikan judul informasi. Sebab, beberapa oknum sering membuat judul yang menjabak agar menarik perhatian masyarakat untuk membacanya.

Selain itu, pihaknya menyarankan untuk melihat sumber berita. Kemudian, hati-hati dengan bentuk forward pesan yang terus-menerus. Kalau sudah seperti itu, ia meminta untuk melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena bisa jadi itu berita hoaks.

(*)-f

Hanya untuk Pasangan Sudah Menikah

JAKARTA (KR) - Pemerintah telah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Salah satunya memuat upaya Pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit.

Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja, dimana Pemerintah akan menggalakkan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

"Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan akibatnya, keluarga berencana, serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksu-

al," ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr Mohammad Syahril SpP MPH di Jakarta, Selasa (6/8) terkait edukasi kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

"Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan," kata Syahril.

Jadi, lanjutnya, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil.

Menurutnya, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang di-

lahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi.

Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan, masyarakat agar tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut. Aturan turunan itu juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

(Ati)-d

Komoditas

Dengan bekal nilai minimal 850 point yang tersebar di dalam batang tubuh Tri Dharma Perguruan Tinggi, mereka mengadu nasib menuju tangga jabatan fungsional guru besar. Bagi dosen karier, semua itu dilakukannya dengan semangat kejujuran akademik. Demi apa? Tentu saja untuk menjemput SK Guru Besar yang menjadi haknya.

Di sisi lain, perburuan jabatan fungsional guru besar juga diminati para pihak bukan dosen karier. Apa yang terjadi kemudian ketika nondosen karier ikut berburu jabatan fungsional guru besar? Atas fenomena itu, ternyata jabatan fungsional guru besar direkonstruksi menjadi bagian dari upaya menghadirkan kasta dan status sosial baru.

Para pemburu status sosial profesor menjadi pesaing berat bagi dosen karier yang meniti tangga jabatan fungsional dari asisten ahli hingga lektor kepala. Siapakah mereka? Berdasarkan jejak digital di jagat maya, mereka di antaranya berasal dari kalangan elite parpol, anggota dewan, pejabat publik, militer, dan pengusaha.

Akibat perburuan status sosial profesor, jabatan fungsional guru besar berubah menjadi komoditas akademik. Selayaknya produk barang dan jasa yang diperdagangkan secara komersial, tentu berlaku hukum dagang: supply dan demand. Dalam konteks ini pembaca pasti sangat paham.

Apa saja prasyarat yang harus dipenuhi. Berapa banyak asupan gizi harus disediakan agar transaksi komoditas akademik jabatan fungsional guru

besar terlaksana. Tentu saja semuanya itu dalam wujud kesepakatan di bawah payung win-win solution.

Siapa pemainnya?

Warganet berhasil menemukan jejak digital akan hal itu. Temuan lainnya mencuat dari realitas media massa. Lewat aktivitas investigasi jurnalistik berhasil dicatat fakta terstruktur yang akurat. Di dalamnya ada oknum dari kementerian yang berwenang mengeluarkan SK Guru Besar. Hadir juga oknum dari perguruan tinggi sebagai pihak pengusul jabatan fungsional guru besar. Terakhir, tentu saja seseorang yang berambisi menjadi guru besar lewat jalan pintas jalur sutra perdagangan komoditas akademik jabatan fungsional guru besar.

Di balik fenomena perdagangan komoditas akademik jabatan fungsional, sejumlah dosen karier menilai pihak kementerian yang mempunyai otoritas menerbitkan SK Guru Besar bertindak iemban cinde emban siladani alias mengedepankan sifat ketidakadilan.

Wujudnya seperti apa? Mereka yang menjalankan kewajibannya sebagai pengajar dengan mengamalkan Tri Dharma, diperlakukan aturan ketat untuk meraih jabatan fungsional guru besar. Sementara pihak nondosen karier dan dosen yang melakukan ketidakjujuran akademik, memperoleh berbagai kemudahan dan keistimewaan akademik. Mereka sangat mudah mendapatkan SK Guru Besar.

Ketidakadilan lainnya mencuat ketika marwah pendidikan warisan Ki Hadjar

Sambungan hal 1

Dewantara secara sepihak diubah kementerian yang mengursi pendidikan. Mereka memformat pendidikan menjadi pabrik pendidikan yang memproduksi gelar akademik.

Sebagai produsen gelar akademik, pabrik pendidikan diwajibkan memasarkan sekaligus membranding produknya sebagai medium meraih status sosial baru berjudul priyayi pendidikan.

Penciptaan gelar priyayi pendidikan, diikuti pembuatan tata kelola baru sebuah pabrik gelar. Tujuannya? Agar pendidikan formal diposisikan sebagai jalan tol. Sebuah jalan bebas hambatan menuju status sosial baru: priyayi pendidikan.

Dari sudut ini, muncul format baru komoditas pendidikan yang menyatakan pendidikan dan pengajaran bukan lagi menjadi sebuah kegiatan belajar mengajar. Pendidikan dan pengajaran tidak ditempatkan sebagai proses pengembangan nalar perasaan dan akal pikiran.

Stempel sosial atas keberadaan priyayi pendidikan dalam konteks komoditas akademik, memiliki konsekuensi logis yang mengharuskan konsumen pabrik gelar memperoleh semat (kekayaan). Menyandang derajati (kasta dan status sosial tinggi). Mempunyai kramat (pangkat dan kekuasaan yang besar) secara cepat lewat proses sangat instan.

(Penulis, pemerhati budaya visual dan Dosen Komunikasi Visual FSRD ISI Yogyakarta)-d

Sambungan hal 1

Jenazah

Richard lantas memaparkan kronologis kejadian, yakni pada pukul 09.30 WIT helikopter jenis IWN MD.500 ER PK milik PT Intan Angkasa Air Service dengan pilot Glen Malcolm Conning membawa enam penumpang dari Bandara Udara Moses Kilangin Timika menuju Distrik Alam

Sambungan hal 1

barulah dibentuk Pansus," ujar Hilman.

Untuk memastikan evaluasi yang komprehensif, Kemenag akan memanggil semua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dari seluruh Indonesia yang melayani jemaah haji. "Kami tentunya sebagai penyelenggara berharap ada sikap yang adil. Di mana saja ada kekurangan, kami akan langsung merespons untuk diperbaiki," pungkasnya.

(Ant/Has)-f

1.883 Bal

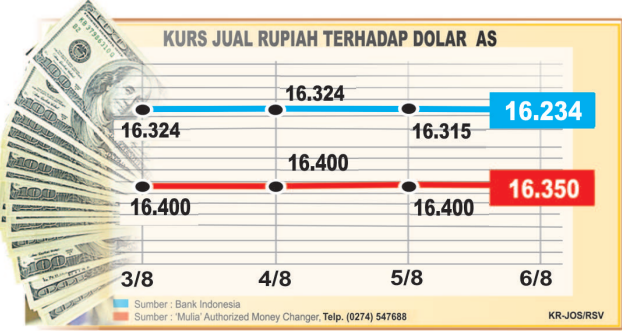
juga mengamankan balpres sebanyak 3.044 bal. Selain balpres, sejumlah barang hasil impor ilegal lainnya juga diamankan.

Kantor Pengawasan Bea Cukai Cikarang berhasil mengamankan 696 produk jadi berupa karpet, 6.578 unit elektronik berupa laptop, ponsel, mesin fotokopi, serta 5.896 buah pakaian jadi dan aksesoris. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menyita 20 ribu kain rol yang tidak dilengkapi perizinan impor.

"Dari hasil tindak tersebut keseluruhan diperkirakan nilai barang yakni sebesar Rp 46.188.205.400. Keseluruhan barang yang disampaikan tadi tidak memenuhi kepatuhan dalam

dangan yang berlaku," ujar Mendag.

(Ant/Has)-f



Prakiraan Cuaca					7 Agustus 2024	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
Cerah	Berawan	Udara Kabur	Hujan Lokal	Hujan Pelir		

Grafis : Arko

Perlunya Peningkatan Literasi Keuangan Bagi Ibu Rumah Tangga



Alfriadi Dwi Atmoko, SE, MSi, Ak CA, ACPA
Dosen Akuntansi Universitas Amikom Yogyakarta

HAI pembaca *Kedaulatan Rakyat* yang kreatif, kali ini saya akan membahas tentang

masalah keuangan yang sering dialami oleh keluarga di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendagri/Kemendagri PMK RI) merilis jumlah presentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada semester 1 tahun 2024 sebesar 0,83% yang berhasil turun sebesar 0,29% pada semester 1 tahun 2023. Salah satu penyebab kemiskinan ini terjadi mungkin akibat ketidaktauan dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu perlu

peningkatan mengenai literasi keuangan bagi rumah tangga.

Seorang ibu, atau sering disebut oleh masyarakat umum sebagai menteri keuangan keluarga memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan keuangan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu seorang wanita perlu memiliki literasi keuangan yang baik. Apabila seorang ibu memiliki literasi keuangan yang baik, maka sistem pengelolaan keuangan keluarga dapat disesuaikan dengan kondisi keluarga. Jangan sampai pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari melebihi pemasukan yang

didapat setiap bulannya. Pada dasarnya keluarga yang sehat akan memiliki sistem keuangan yang baik pula.

Literasi keuangan yang wajib dimiliki oleh seorang ibu rumah tangga adalah pengelolaan keuangan untuk kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka Panjang. Kebutuhan jangka pendek misalnya adalah untuk pembelian kebutuhan bahan pokok makanan, kebutuhan dapur, kebutuhan kamar mandi dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan jangka panjang misalnya kebutuhan 5 sampai 10 tahun lagi seperti apabila keluarga tersebut baru saja

menikah dan berencana memiliki momongan segera maka perlu dipikirkan untuk alokasi biaya sekolah, pembelian rumah tempat tinggal, pembelian kendaraan atau mobil dan lain sebagainya.

Mungkin semua di atas merupakan hal yang sederhana, namun apabila dilakukan ternyata memang berat, apalagi jika ada biaya yang harus dikeluarkan secara tak terduga dengan nominal yang cukup besar. Maka untuk biaya tak terduga juga perlu alokasi secara khusus setiap bulan, apabila uang tersebut tidak digunakan maka dapat digunakan untuk alokasi kebutuhan jangka Panjang.

Perlu komitmen dan konsisten untuk mengelola keuangan dengan baik agar keuangan keluarga tetap sehat.

Setelah kita mengetahui tingkat kesehatan keuangan kita dan jika keuangan kita sudah benar-benar sehat, maka dapat lanjut investasi. Pilihan investasi sangatlah banyak, diantaranya adalah dengan budi daya jamur tiram, budi daya ikan lele dengan terpal hingga investasi dalam bentuk emas. Budi daya jamur tiram maupun ikan lele dengan terpal dapat dipilih sebagai alternatif pilihan investasi. Dengan memanfaatkan lahan yang tidak terlalu



besar pilihan investasi ini cocok dilakukan karena tidak terlalu membutuhkan waktu yang panjang, namun perawatan harus tetap dijaga agar jamur tiram maupun lele dapat berkembang dengan baik dan mendapatkan keuntungan pada masa panen. Investasi dalam bentuk emas juga sangat menarik terlihat dari tren kenaikan harga dari tahun ke tahun. Nah maka dari itu yuk para ibu rumah tangga meleak akan pentingnya literasi keuangan untuk rumah tangga.